

Pers Rilis

Janji yang Hilang: Komisi Orang Hilang 10 Tahun Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor Leste

Jakarta, Indonesia dan Dili, Timor-Leste
13 Juli 2018

Lima belas Juli 2018 menandai 10 tahun diserahkannya laporan akhir berjudul *Per Memoriam Ad Spem* (Melalui Kenangan Menuju Harapan) oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia dan Timor-Leste. KKP merupakan satu-satunya komisi bilateral di dunia yang memiliki mandat memperkokoh perdamaian dan persahabatan antar dua negara melalui pengungkapan kebenaran konklusif atas kekerasan di Timor-Timur pada tahun 1999. Berbagai pihak mengapresiasi KKP sebagai langkah pengakuan masa lalu dan mendukung terbentuknya hubungan yang baik.

KKP menghasilkan temuan akan pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan tanggung jawab institusional. Lima rekomendasi dari laporan KKP antara lain: 1) akuntabilitas dan reformasi kelembagaan; 2) kebijakan perbatasan dan keamanan bersama; 3) pusat dokumentasi dan resolusi konflik; 4) persoalan ekonomi dan aset; 5) pembentukan komisi untuk orang-orang hilang. Pada laporan eksekutif KKP tercantum rekomendasi penting lain berupa pengakuan dan komitmen dan mencegah terulangnya kembali kejadian serupa.

Hampir setiap tahun sejak rilis laporan, rekomendasi KKP menjadi poin diskusi dalam Senior Official Meetings antara Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste. Namun hingga saat ini, belum ada kemajuan berarti dalam membentuk komisi orang hilang karena pertemuan lebih banyak menekankan pada penguatan relasi politik dan ekonomi.

KKP memperkuat temuan komisi kebenaran Timor-Leste, CAVR, atas keberadaan ribuan anak Timor Leste—saat ini telah dewasa—yang dipindahkan paksa ke Indonesia. Dalam rekomendasi mengenai komisi orang hilang, KKP meminta kedua negara mengambil tindakan untuk menemukan, mempertemukan kembali mereka dengan keluarganya dan memenuhi hak-hak mereka

Sementara itu, organisasi masyarakat sipil melakukan inisiatif melacak “anak-anak yang dicuri” dan keluarga semenjak tahun 2013. Sejumlah 111 korban berhasil didokumentasikan dan 57 orang telah mengikuti reuni keluarga di Timor-Leste. Reunifikasi mendapat dukungan institusi hak asasi manusia dan kementerian terkait dari kedua negara. Kami menemukan bahwa mayoritas anak-anak memiliki hidup yang sulit dan masih bergelut dengan trauma. Berbagai tantangan muncul melalui proses reunifikasi karena terdapatnya perbedaan kultur, tradisi, dan agama mereka dengan keluarga kandungannya.

Upaya masyarakat sipil seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia dan Timor Leste dengan membentuk Komisi Orang Hilang sehingga mampu memperbaiki situasi mereka yang masih hilang, memastikan dapat diaksesnya prosedur identifikasi dan kewarganegaraan, serta memberikan pemulihan bagi para korban. Kedua pemerintah harus bekerja sama untuk dapat memberikan status visa khusus kepada “anak-anak yang dicuri” dan keluarga untuk memfasilitasi perjalanan mereka bertemu dengan keluarganya. Saat ini, kehadiran lembaga pemerintahan di

Timor-Leste bernama Centro Nacional Chega! tengah mengembangkan mekanisme untuk mendokumentasi dan mencari “anak-anak yang dicuri” serta memfasilitasi kunjungan reuni “anak-anak yang dicuri” dan keluarganya secara masif.

Penting untuk membina hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Timor-Leste mengenai orang hilang. Upaya reunifikasi menjadi suatu bentuk pengakuan sejarah konflik dan menempatkannya dalam konteks pemulihan dan penghormatan terhadap korban. Jika tidak, inisiatif baik ini hanya menjadi rasa persahabatan yang meniadakan pengakuan kebenaran konklusif yang dibutuhkan untuk memenuhi hak para korban.

Kelompok Kerja untuk “Stolen Children”

Regional : Asia Justice and Rights (AJAR)

Indonesia : IKOHI, KontraS, ELSAM, Labarik Lakon, KontraS Sulawesi, KontraS Jawa Timur, LBH Bandung, Yayasan Satu Keadilan

Timor-Leste : Centro Nacional Chega, Yayasan HAK, ACBIT, Timor Leste Red Cross Society (CVTL), Yayasan Alola, ICRC-TL, Universitas Nacional Timor Leste, Asosiasaun Vitima Konfliktu Politiku 74-99

Narahubung:

Bahasa Inggris dan Indonesia:

Indria Fernida (Koordinator Program Regional AJAR), ifernida@asia-ajar.org, +62-816.1466.341

Yati Andriyani (Koordinator KontraS), yatiandriyani@kontras.org, +62-815.866.64599

Bahasa Inggris dan Tetun

Jose Luis de Oliveira (Program Manager AJAR Timor Leste), lurumata@gmail.com, +67-077237170

Gaudencio Sousa (Koordinator Relasi Eksternal Centro Nacional Chega!), gaudencio.cnc@gmail.com, +67073071354

Press Release

A Disappearing Promise: Commission on Disappeared Persons 10 Years of Commission of Truth and Friendship of Indonesia and Timor-Leste

Jakarta, Indonesia and Dili, Timor-Leste
13 July 2018

15 July 2018 marks the 10th anniversary of *Per Memoriam Ad Spem* [Through Memory towards Hope], the final report of the Commission of Truth and Friendship (CTF) of Indonesia and Timor-Leste. This initiative, the only bilateral commission in the world, was tasked with strengthening peace and friendship between the two countries by revealing the conclusive truth about the nature, scope, and causes of the violence committed in East Timor in 1999. Many people appreciated the CTF as the way to acknowledge the past and support the building of good relationships.

The CTF made significant findings about gross violations of human rights, crimes against humanity, and institutional responsibility. Five important recommendations from the CTF report cover: 1) accountability and institutional reform, 2) joint border and security policy, 3) documentation and conflict resolution centre, 4) economic and assets issues, and 5) a commission on disappeared persons. The executive summary of the report adds another important recommendation on acknowledgement, a firm commitment to prevent recurrence of such violence and fulfill their rights.

Almost every year since the report's release, CTF recommendations have been discussed during Senior Official Meetings between the governments of Indonesia and Timor-Leste. Most discussions seek to strengthen bilateral political and economic relations. However, there has been no progress to date regarding the recommendation to establish a commission on the disappeared.

The CTF concurred with findings of the Timor-Leste truth commission, CAVR, that thousands of East Timorese children, now adults, were forcibly transferred to Indonesia. Under its recommendation regarding a Commission for Disappeared Persons, the CTF recommended that both countries take action to identify the whereabouts of children separated from their families and notify their families in Timor-Leste.

Meanwhile, civil society organizations have tracked "stolen children" and their families since 2013. A working group has documented a total of 111 forcibly displaced victims; and 57 of them have participated in family reunions in Timor-Leste. These reunification efforts have received support from human rights institutions and related ministries in both countries. The majority of the stolen children who have been documented have had a difficult life and are still struggling with trauma. A challenge for the reunification effort is that some of those displaced now identify with a different culture, tradition, and religion than their families of origin.

The governments of Indonesia and Timor-Leste have a responsibility to establish a commission on the disappeared. The commission should prioritize the identification of these individuals and their families of origin, ensure access to citizenship procedures, and provide recovery for those suffering from trauma. Both governments must work together to facilitate visits between "stolen children" and their families by granting them a special visa status. The recently-established Centro Nacional

Chega! in Timor-Leste is developing a mechanism to document and to find "stolen children" as well as to facilitate a massive and procedural reunion of them with their families.

It is important that fostering good relations and cooperation between Indonesia and Timor-Leste regarding disappeared persons and reunification acknowledges the history of the conflict and situates these visits in the context of reparation and respect for victims' lives. Otherwise, these good initiatives may bring a sense of friendship without acknowledging the conclusive truth that is needed to fulfill victims' rights.

Working Group on "Stolen Children"

Regional : Asia Justice and Rights (AJAR)
Indonesia : IKOHI, KontraS, ELSAM, Labarik Lakon, KontraS Sulawesi, KontraS Jawa Timur, LBH Bandung, Yayasan Satu Keadilan
Timor-Leste : Centro Nacional Chega, Yayasan HAK, ACBIT, Timor Leste Red Cross Society (CVTL), Yayasan Alola, ICRC-TL, , Universitas Nacional Timor Leste, Asosiasaun Vitima Konfliktu Politiku 74-99

Contact persons:

English and Indonesian Language:

Indria Fernida (AJAR's Regional Program Coordinator), ifernida@asia-ajar.org, +62-816.1466.341

Yati Andriyani (Coordinator of KontraS), yatiandriyani@kontras.org, +62-815.866.64599

English and Tetun Language:

Jose Luis de Oliveira (AJAR Timor-Leste's Program Director), lurumata@gmail.com, +67-077237170

Gaudencio Sousa (Coordinator of External Affairs Centro Nacional Chega!), gaudencio.cnc@gmail.com, +67073071354